



Judul : Cegah kekerasan seksual, DPR harap Kemenag aktif awasi ponpes
Tanggal : Minggu, 17 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Kekerasan Seksual DPR Harap Kemenag Aktif Awasi Ponpes

ANGGOTA Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq meminta Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat sistem pendampingan dalam proses pendirian pondok pesantren (ponpes). Desakan ini muncul menyusul maraknya kasus kekerasan seksual yang terus berulang di lingkungan ponpes, seperti dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah (Jateng).

Kemenag, kata Maman, tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi izin administrasi, tetapi harus hadir memastikan setiap lembaga pendidikan keagamaan memiliki sistem pengawasan dan perlindungan anak yang memadai sejak awal berdiri.

"Kasus kekerasan seksual yang masih terus terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan sistem perlindungan anak di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan," ujar Maman, dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Maman menjelaskan, pendampingan ini bertujuan untuk membekali pengelola ponpes dengan kapasitas manajerial dan pemahaman mendalam terkait hak perlindungan anak. Karena selama ini, banyak ponpes didirikan dengan semangat dakwah yang tinggi, tapi sering kali belum memiliki standar pengelolaan lembaga pendidikan yang sehat dan aman bagi santri.

Pendampingan ini bukan untuk mempersulit, melainkan memastikan ponpes tumbuh

dengan sistem yang baik. "Negara harus membantu ponpes memiliki standar operasional yang jelas, termasuk mekanisme pengawasan terhadap tenaga pengajar dan pola pengasuhan santri," tegas politisi PKB ini.

Menurutnya, penguatan tata kelola ini krusial untuk menjaga marwah ponpes sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter bangsa. Saat ini, mayoritas ponpes di Indonesia telah menjalankan fungsi pendidikan dengan baik, sehingga tindakan menyimpang dari oknum tidak boleh merusak kepercayaan publik secara luas.

"Jangan sampai kasus yang dilakukan oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap ponpes," jelasnya. Karena itu, penguatan tata kelola adalah kunci agar ponpes tetap menjadi tempat pendidikan yang paling aman dan dipercaya masyarakat.

Selain itu, Maman mengimbau para orang tua agar lebih selektif dalam memilih ponpes. Caranya, masyarakat disarankan untuk aktif menelusuri sistem pendidikan, rekam jejak pengasuh, hingga pola pengawasan di lingkungan ponpes sebelum menitipkan anak mereka.

"Orang tua harus memastikan lingkungan ponpes transparan dan mengedepankan perlindungan anak. Jangan hanya tergiur oleh popularitas atau label semata," ingatnya. ■ TIF